

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Sistem pengendalian internal pemberian kredit di Primkoppol Mapolda Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai karena masih ada beberapa komponen yang tidak terlaksana seperti:
 - a. Struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggungjawab secara tegas. Bagian yang berhubungan dengan pemberian kredit yaitu bagian administrasi dan bagian simpan pinjam tugas dari kedua bagian tersebut sama.
 - b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan dimana karyawan tidak ada pendidikan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan.
 - c. Pemeriksaan mendadak. Pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini belum pernah ada pemeriksaan mendadak dari auditor maupun dari pengawas.
 - d. Perputaran jabatan. Pengurus beranggapan bahwa apabila diadakannya rotasi jabatan para karyawan akan memulai semua dari nol dan akan memakan waktu untuk karyawan belajar kembali serta ada beberapa karyawan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya apabila dilakukan rotasi jabatan.

- e. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Cuti yang diberikan kepada karyawannya hanya saja ada cuti hamil bagi karyawan selama 3 bulan.
 - f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Tidak ada unit organisasi yang bertugas mengecek unsur unsur pengendalian internal pada koperasi. Tetapi ada pengawas yang mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
2. Pengakuan dan penyajian atas piutang anggota pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai dalam melakukan pengakuan dan penyajian piutang dalam laporan neraca di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Karena masih disatukannya penyajian penyisihan piutang tak tertagih untuk unit usaha simpan pinjam dengan unit usaha niaga pada tahun 2018-2021.
 3. Pembiayaan terkendali melalui sistem pengendalian internal pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai karena pada analisis kredit pengurus hanya menganalisis anggota dari gaji yang dimilikinya saja dan tidak menganalisis lebih lanjut menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

5.2 Saran

1. Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini hendaknya membedakan untuk bagian administrasi dan bagian simpan pinjam agar dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk membedakan tugasnya pada bagian administrasi dapat melakukan pemrosesan data anggota terkait dengan simpanan pokok dan simpanan wajib serta dapat mengelola dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian pinjaman. Untuk bagian simpan pinjaman dapat lebih difokuskan kepada pemberian pinjaman kepada anggota. Membedakan tugas seperti ini dapat mencegah terjadinya ketidakjelasan tanggungjawab dengan begitu setiap bagian dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
2. Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini hendaknya lebih memperhatikan karyawan dengan memberikan pelatihan untuk mengembangkan pendidikan karyawan agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik lagi dan akan membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Serta memberikan cuti kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan agar karyawan tidak stress, kelelahan dan mencegah terjadinya penurunan produktivitas.
3. Koperasi sebaiknya membuat suatu unit organisasi yang melakukan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan mendadak terkait pengendalian internal untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik

dan mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang atau pencurian.

4. Koperasi dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan perputaran jabatan bagi karyawan agar dapat mengembangkan keterampilan dan pengalaman baru serta mencegah terjadinya potensi kolusi.
5. Sebaiknya Primkoppol Mapolda Jawa Barat dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait piutang yang macet dengan cara memisahkan penyisihan piutang tak tertagih untuk setiap unitnya. Koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana risiko tersebut berdampak pada keuangan dan operasional tiap unit kerja.
6. Sebaiknya dalam menganalisis kredit oleh Ketua dan Bendahara dapat melakukan analisis dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) untuk memastikan bahwa anggota yang meminjam mampu untuk melunasi pinjaman yang diajukan serta untuk meminimalkan risiko terjadinya piutang tak tertagih.
7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi pada tema yang sama dan dapat dikembangkan dan diperbaiki sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.